

**REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2019**

Pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Perhubungan

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2019, PPID Kementerian Perhubungan dan perangkat PPID Kementerian Perhubungan telah menerima 372 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebanyak 27 permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Utama;
2. Sebanyak 221 permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Pelaksana; dan
3. Sebanyak 124 permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Pelaksana UPT di seluruh lingkungan Kementerian Perhubungan.

NO.	UNIT PPID	JUMLAH PEMOHON INFORMASI
1.	PPID Utama	27
2.	PPID Inspektorat Jenderal	Nihil
3.	PPID Pelaksana:	
	PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Darat	6
	PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Laut	50
	PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Udara	11
	PPID Pelaksana Ditjen Perkeretaapian	12
	PPID Pelaksana Balitbanghub	23
	PPID Pelaksana BPSDMP	119
	PPID Pelaksana BPTJ	Nihil
4.	PPID Pelaksana UPT	124

B. Status Penerimaan

Pada jangka waktu penerimaan permohonan informasi pada tahun 2019. seluruh permohonan informasi yang masuk diterima sepenuhnya.

C. Jumlah Keberatan Permohonan Informasi

NO.	UNIT PPID	JUMLAH KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI
1.	PPID Utama	3
2.	PPID Inspektorat Jenderal	Nihil
3.	PPID Pelaksana:	
	PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Darat	1 (Sutarno)
	PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Laut	Nihil
	PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Udara	1 (Johan)
	PPID Pelaksana Ditjen Perkeretaapian	1 (PKN)
	PPID Pelaksana Balitbanghub	Nihil
	PPID Pelaksana BPSDMP	Nihil
	PPID Pelaksana BPTJ	Nihil
4.	PPID Pelaksana UPT	Nihil

D. Kedudukan Hukum Pemohon Informasi Publik

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon informasi publik, maka dari 372 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan, sebanyak 369 permohonan informasi publik diajukan oleh Warga Negara Indonesia dan sebanyak 3 permohonan informasi publik diajukan oleh Badan Hukum Indonesia.

E. Kategorisasi Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2019, permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Kementerian Perhubungan adalah berkaitan dengan data teknis infrastruktur transportasi, regulasi transportasi, perizinan, organisasi Kementerian Perhubungan. Rincian pengkategorian informasi publik sebagai berikut:

NO.	JENIS KATEGORI INFORMASI	JUMLAH
1.	Perizinan	39
2.	Anggaran	17
3.	Data statistik perhubungan	18

4.	Logistik	1
5.	Jumlah kapal	4
6.	Mudik gratis Kementerian Perhubungan	63
7.	Angkutan multimoda	-
8.	Pelelangan	13
9.	Organisasi	-
10.	Jalur KA dan grafik perjalanan KA	1
11.	Regulasi	45
12.	Tol laut	1
13.	Navigasi pelayaran	1
14.	Pembangunan infrastruktur/data teknis	5
15.	Laporan keuangan	4
16.	Investasi	-
17.	Dokumentasi infrastruktur	-
18.	Kepelautan	39
19.	Keperintisan	-
20.	Diklat dan Sipencatar	113
21.	Informasi <i>On Time Performance</i> (OTP) Maskapai	1
22.	Informasi maskapai penerbangan	8

F. Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik

Selama Tahun 2019, PPID Utama Kementerian Perhubungan menerima 372 permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 5-7 hari kerja.

G. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2019, Kementerian Perhubungan telah menerima 3 keberatan yang ditujukan kepada PPID Pelaksana. Namun hanya satu keberatan informasi publik yang berlanjut ke tahap penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Publik. Pokok sengketa informasi yang diajukan, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Sutarno dengan Termohon PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.** Keterangan Sidang dicabut oleh Pemohon Sutarno karena beliau telah memiliki dokumen yang dimohonkan dari Institusi Pemerintah lain (Kemneterian Hukum dan HAM).